

Analisis Jangkauan (*Outreach*) LKMS bagi Rumahtangga Miskin Sektor Pertanian di Perdesaan Bogor, Jawa Barat

(The Outreach Analysis of Islamic Microfinance for the Poor Household of Agricultural Sector at Rural Bogor, West Java)

Yani Mulyaningsih^{1*}, Nunung Nuryartono², Rina Oktaviani², Carunia Mulya Firdausy¹

(Diterima Mei 2015/Disetujui September 2015)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab hipotesis bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menjangkau rumahtangga miskin sektor pertanian di perdesaan Bogor Jawa Barat. Mayoritas masyarakat miskin di Indonesia tinggal di perdesaan. Tidak adanya akses terhadap kredit/pembiayaan sebagai salah satu alasan kenapa mereka tetap miskin. Kredit/pembiayaan sebagai instrumen yang *powerful* untuk memotong rantai kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kredit dapat meningkatkan pendapatan, sehingga potensial untuk bisa menabung, adanya akumulasi modal konsekuensinya akan semakin meningkatkan pendapatan. Namun, menyediakan kredit bagi masyarakat miskin sektor pertanian di perdesaan dalam banyak kasus merupakan aktivitas yang tinggi biayanya. Perbankan tidak akan tertarik melayani segmen masyarakat ini. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah diharapkan bisa menjembatani masyarakat miskin ini untuk memperoleh layanan keuangan baik berupa pembiayaan dan tabungan. Pada umumnya, nilai pinjaman rata-rata digunakan untuk mengukur jangkauan layanan nasabah lembaga keuangan mikro. Pengukuran ini relatif sederhana. Penggunaan metode dari CGAP (*Consultative Group to Assist the Poorest*) bisa menunjukkan jangkauan LKMS bagi rumahtangga miskin sebagai fenomena multidimensi kemiskinan. Hasil studi menyatakan bahwa LKMS tidak menjangkau rumahtangga miskin sektor pertanian di perdesaan.

Kata kunci: jangkauan layanan, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), metode CGAP, rumahtangga miskin sektor pertanian

ABSTRACT

The Objective of research to acknowledge the hypothesis: outreach islamic microfinance for the poor household of agricultural sector at rural Bogor West Java. The majority of the poor community in Indonesia stay at rural areas. Lack of access credit/financing generally seen as one of the main reasons why many people remain poor. Credit/financing as a powerful instrument to help poor people break out of the vicious cycle because it has the potential to improve income and savings, consequently, enhance capital accumulation, and reinforce high incomes, but providing credit to the poor of agricultural sector in many cases is a very costly activity. Bank isn't interest to serve it. Hopefully, islamic microfinance institutions reaches to more the poor of agricultural sector. The average loan is the most commonly used to measure the degree of microfinance institutions (MFIs) outreach to poor customer segments, but it is very simple. Using the CGAP (Consultative Group to assist the poorest) method, the poverty multidimension of islamic microfinance outreach was measured. The result of study showed that islamic MFIs didn't reach the poor household of agricultural sector at rural Bogor West Java.

Keywords: CGAP method, islamic microfinance, outreach, rural, the poor household of agricultural sector

PENDAHULUAN

Akses terhadap lembaga keuangan melalui layanan tabungan, kredit, dan layanan keuangan lainnya bertujuan untuk memperbaiki kemampuan masyarakat untuk memperlancar konsumsi, produksi, dan investasi. Pelayanan tabungan bisa digunakan sebagai simpanan dan perlindungan terhadap modal

yang kecil juga untuk akumulasi modal karena disertai adanya pendapatan bunga atau bagi hasil. Kredit memungkinkan untuk peminjam mendapat uang kas saat ini untuk keperluan produksi, konsumsi, kegiatan sosial, dan melakukan pembayaran kemudian dengan tingkat bunga/bagi hasil tertentu. Bahkan bagi masyarakat miskin, akses ke lembaga keuangan secara permanen dapat meningkatkan pendapatan, membangun aset, dan mengurangi segala kerentanan sebagai akibat faktor eksternal (Diagne & Zeller 2001).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih relatif tinggi, pada tahun 2013, sebesar 28.066.560 jiwa dan sebagian besar dari penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah perdesaan, yaitu 17.740.000 jiwa (BPS 2014), yang mayoritas bermata pencaharian di sektor

¹ Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan 12190.

² Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.

* Penulis Korespondensi: E-mail: yanis7469@yahoo.com

pertanian. Beberapa studi menyatakan masyarakat di perdesaan negara berkembang kekurangan akses terhadap kredit perbankan (Nuryartono 2007; Saptono *et al.* 2010; Mpuga 2010; Thoha *et al.* 2010; Li *et al.* 2011). Berdasarkan data *global finansial inclusion* tahun 2011 hanya 26,03% masyarakat perdesaan negara yang berpendapatan menengah bawah (termasuk Indonesia) yang mempunyai rekening di keuangan formal (World Bank 2011). Dari sisi perbankan pemberian layanan terhadap masyarakat berpendapatan rendah terlalu mahal biayanya karena tingginya biaya transaksi dan informasi (Hermes & Lensink 2011; Hermes *et al.* 2011). Perbankan membutuhkan investasi yang tinggi untuk membuka *outlet* atau kantor cabang, juga dalam penyediaan tenaga kerja. Kondisi ini tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh karena masyarakat pada segmen ini hanya menabung dan meminjam dana dengan nilai nominal yang kecil-kecil. Pinjaman yang relatif kecil ini menyebabkan perbankan segan untuk memberikan kredit pada segmen kelompok ini (Hulme *et al.* 1996). Pertimbangan efisiensi dalam penyaluran kredit kepada masyarakat miskin ini sering menjadi pertimbangan utama bagi perbankan, di samping juga masalah ketiadaan *collateral* bagi masyarakat miskin (Ahmed 2002; Rahman 2007; Li *et al.* 2011), sehingga diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya keuangan mikro di negara berkembang, sebagai upaya memperbaiki akses bagi rumahtangga miskin ke pasar keuangan (Zeller & Sharma 2000; Nader 2008; Menkhoff & Rungruxsirivorn 2011). Di Indonesia, banyak lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Peran lembaga keuangan mikro syariah ini masih baru dalam layanan keuangan mikro di Indonesia. Berdiri di Indonesia sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, walaupun masih baru keberadaannya tetapi relatif berkembang dan telah banyak beroperasi di wilayah perdesaan dan terpencil yang tidak dijangkau oleh perbankan (Buchori 2012). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa LKMS menjangkau rumahtangga miskin sektor pertanian di perdesaan.

Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh LKMS di Pulau Jawa bervariasi kurang dari Rp500.000,00 sampai lebih dari Rp2.500.000,00 (BI bekerjasama dengan UNPAD, UNDIP, dan UNAIR dalam Buchori 2012). Berdasarkan nilai pembiayaan rata-rata yang relatif kecil tersebut bisa dikatakan bahwa jangkauan layanan LKMS diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Hanya masyarakat miskin yang memerlukan nilai pembiayaan yang relatif kecil tersebut. Namun, pengukuran jangkauan layanan dengan menggunakan rata-rata pinjaman sebagai indikator masyarakat miskin yang menjadi target jangkauan layanannya, relatif sederhana dan sangat kasar (Navajas *et al.* 2000). Untuk itu, perlu dipertimbangkan indikator lain-

nya yang menggambarkan secara komprehensif kondisi masyarakat miskin yang menjadi nasabahnya. Metode dari CGAP (*Consultative Group to Assist the Poorest*) telah banyak digunakan diberbagai negara sebagai alat dalam mengukur jangkauan layanan LKM bagi masyarakat miskin. Dengan metode ini berhasil digambarkan multidimensi indikator kemiskinan yang menjadi target layanan LKM. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah menganalisis apakah LKMS menjangkau rumahtangga miskin sektor pertanian di perdesaan.

Landasan Teori

LKM merupakan penyedia layanan keuangan bagi usaha mikro dan masyarakat miskin (Morduch 1998; Miyashita 2000; Godquin 2004; Aubert *et al.* 2009; Todaro & Smith 2009; Mersland & Strom 2010; Islam & Maitra 2011; Montgomery & Weiss 2011; El-Komi & Croson 2012; Hundak 2012; Ali *et al.* 2013). Dalam literatur, memfokuskan layanan bagi masyarakat miskin disebut sebagai *outreach* (Hermes *et al.* 2011). Lebih detail terkait dengan *outreach* LKM bagi masyarakat miskin LKM dimasukkan sebagai aspek *the depth outreach*. Paxton dan Cuevas (2002) mengemukakan bahwa *the depth outreach* mengindikasikan seberapa besar kelompok yang selama ini tidak memperoleh layanan dapat terjangkau oleh layanan lembaga. Di negara berkembang, kebanyakan institusi keuangan baik formal maupun semi formal secara konsisten tidak melayani beberapa kategori masyarakat, yaitu masyarakat miskin, perempuan, masyarakat perdesaan, dan tidak berpendidikan.

Dengan tidak memperoleh layanan kredit maka masyarakat miskin terperangkap apa yang dinamakan "*a vicious circle*". Mereka miskin karena rendahnya tingkat pendapatan yang menyebabkan rendahnya tabungan, sehingga menghambat investasi dikarenakan rendahnya pendapatan. Kredit memberikan masyarakat miskin untuk investasi sehingga memecahkan lingkaran kemiskinan tersebut (Hulme *et al.* 1996).

Pada umumnya, untuk mengukur jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dari lembaga keuangan mikro menggunakan rata-rata jumlah pinjaman (Cull *et al.* 2007; Mersland & Strom 2010; Hermes *et al.* 2011). CARE International dan Mercy Corps (LSM internasional) yang mempunyai program pengembangan keuangan mikro di Indonesia (Munawar 2010), nasabah miskin didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapatkan kredit dengan nominal di bawah Rp5.000.000,00. Masyarakat miskin di sini bukan berarti masyarakat yang sangat miskin (*the poorest*) karena persyaratan memperoleh pinjaman telah mengoperasikan usahanya minimal satu tahun (Gonzales-Vega *et al.* 1997). Artinya jenis pinjaman yang digunakan adalah pinjaman produktif. Dalam lingkup internasional, nilai kredit mikro sebesar \$100 (El-Komi & Croson 2012) diperuntukkan bagi masyarakat paling miskin.

Masalah kemiskinan melibatkan multidimensi aspek, sehingga diperlukan pengukuran yang lebih komprehensif tidak sekedar dari nilai pembiayaan yang diberikan. Salah satu metode untuk mengukur jangkauan layanan lembaga keuangan mikro bagi masyarakat miskin adalah menggunakan indeks kemiskinan relatif dari CGAP. Lembaga tersebut mengembangkan alat terstandarisasi untuk mengukur tingkat kemiskinan nasabah LKM. Model dibangun dengan menggunakan PCA (*Principal Component Analysis*) yang didasarkan kepada beberapa indikator yang menggambarkan multidimensional kemiskinan. Pengukuran kemiskinan bukan semata hanya pada dimensi pendapatan saja, tetapi juga meliputi dimensi-dimensi lainnya. Metode ini mencakup dimensi lainnya terkait dengan kemiskinan, yaitu dimensi yang terkait dengan pendapatan, sumber daya manusia, perumahan, ketahanan, dan kerawanan pangan serta dimensi kepemilikan aset. Metode pengukuran ini bisa digunakan untuk mengukur kemiskinan relatif antara masyarakat yang sudah menjadi nasabah lembaga keuangan mikro dan kelompok kontrolnya adalah masyarakat bukan nasabah dalam lingkungan yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pemilihan Kabupaten Bogor dilakukan secara sengaja (*purposive*), karena merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah BMT yang besar, juga memiliki jumlah masyarakat miskin tertinggi pada tahun 2012 (BPS 2013). Penelitian ini menggunakan data kerat lintang (*cross section*) dengan menggunakan data primer yang didapat dengan daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner) kepada nasabah LKMS dan wawancara mendalam kepada LKMS.

Dengan teknik *snowball*, didapat beberapa LKMS yang mempunyai nasabah dengan mata pencaharian di sektor pertanian, yaitu: tanaman pangan dan hortikultura, serta usaha ternak. Penggunaan teknik ini dilakukan karena tidak ada kerangka *sampling*, sehingga sulit untuk mendapatkan data terkait dengan LKMS di Kabupaten Bogor, terutama data alokasi pembiayaan berdasarkan sektor usaha. Pada umumnya, alokasi pembiayaan LKMS lebih banyak ke sektor perdagangan, jarang yang mempunyai portofolio pembiayaan di sektor pertanian, walaupun di perdesaan. Hanya LKMS dengan nasabah yang bermata pencaharian di sektor pertanian yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dengan teknik *snowball* tersebut didapat jumlah nasabah LKMS yang merupakan rumah tangga yang mempunyai mata pencaharian disektor pertanian sebanyak 79 nasabah. Sebagai kelompok pembandingnya adalah bukan nasabah yang mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian pada lingkungan, karakteristik sosial ekonomi, dan fasilitas infrastruktur yang sama, yaitu sebanyak 52 rumah tangga bukan nasabah LKMS.

Metode Analisis

Metode dari CGAP banyak digunakan untuk mengukur *outreach* bagi masyarakat miskin di berbagai negara (Copestake *et al.* 2005; Zeller *et al.* 2006). Untuk itu metode ini akan digunakan untuk menganalisis jangkauan layanan dari lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Untuk keperluan tersebut perlu dilakukan perbandingan beberapa indikator terpilih antara masyarakat yang sudah akses dan belum akses kepada LKMS. Dengan menggunakan teknik PCA, beberapa indikator dapat dikombinasikan secara efektif untuk mengukur kemiskinan relatif dari masyarakat. Pengeluaran rata-rata tahunan untuk pakaian dijadikan proksi dari pendapatan, yang menunjukkan indikator kemiskinan dan dikorelasikan dengan dimensi lainnya. Dimensi-dimensi tersebut antara lain: modal manusia (*human capital*), perumahan, kepemilikan aset, juga ketahanan, dan kerawanan pangan. Indeks yang dihasilkan merupakan indeks kemiskinan relatif yang mempunyai nilai negatif. Nilai negatif yang dimiliki untuk indeks kemiskinan mengidentifikasi masyarakat yang miskin dibandingkan populasi rata-rata, sementara nilai positif mengindikasikan kesejahteraan di atas rata-rata.

PCA ini bisa mengisolasi dan mengukur komponen kemiskinan yang melekat kepada beberapa indikator dan membuat nilai kemiskinan masyarakat secara spesifik (Zeller *et al.* 2006). Kemiskinan relatif dapat diperbandingkan antara yang menerima layanan dari lembaga keuangan dan yang tidak menerima layanan dari lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis jangkauan layanan LKMS dengan menggunakan analisis komponen utama (PCA) dilakukan beberapa tahapan (Henry *et al.* 2000). Tahapan awal memformulasikan variabel-variabel yang menggambarkan multidimensi dari kemiskinan, yang meliputi variabel pendapatan (diproksi dari variabel pengeluaran pakaian), variabel sumber daya manusia, perumahan, ketahanan, dan kerawanan pangan juga variabel kepemilikan aset. Masing-masing variabel tersebut diturunkan ke dalam beberapa komponen seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.

Selanjutnya masing-masing komponen tersebut dikorelasikan dengan komponen *benchmark*, yaitu pengeluaran pakaian. Semua komponen yang mewakili masing-masing variabel tersebut kemudian dikorelasikan. Komponen yang berkorelasi dengan komponen *benchmark* dan mempunyai nilai signifikansi (2-tailed) yang akan digunakan untuk analisis komponen utama. Hasil korelasi tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan komponen yang memiliki korelasi dan nilai signifikansi adalah komponen rasio bekerja dengan tidak bekerja, status kepemilikan tempat tinggal, kualitas bahan atap, jumlah makanan yang tersaji dalam dua hari, merasa kekurangan makanan dalam sebulan, frekuensi pembelian beras,

Tabel 1 Variabel dan komponen yang digunakan untuk menghitung indeks kemiskinan relatif

Sumber daya manusia	Perumahan	Ketahanan dan rawan pangan	Aset
<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata umur anggota masyarakat dewasa • Persentase jumlah orang dewasa yang bisa menulis • Persentase tingkat pendidikan anggota masyarakat dewasa • Persentase orang dewasa yang bekerja • Jumlah anak-anak yang di bawah 15 tahun • Rasio anak-anak di bawah 15 tahun terhadap orang dewasa • Rasio yang tidak bekerja terhadap yang bekerja • Pengeluaran anggota masyarakat untuk pakaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Status kepemilikan rumah • Jumlah ruangan • Tipe material untuk atap • Tipe dinding • Tipe lantai • Kondisi rumah • Tipe koneksi listrik • Tipe bahan bakar yang digunakan untuk masak • Tipe toilet yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah makanan yang tersaji dalam dua hari terakhir • Frekuensi makanan mewah (daging ayam dan sapi) yang tersaji dalam seminggu • Frekuensi makanan inferior (ikan asin) dalam seminggu • Kelaparan dalam satu bulan terakhir • Kelaparan dalam satu tahun terakhir • Frekuensi pembelian makanan pokok • Ukuran dari stok makanan pokok • Tambahan makanan apabila ada peningkatan pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas dan nilai tanah yang dimiliki • Jumlah dan nilai ternak yang dimiliki • Kepemilikan dan nilai yang berhubungan dengan aset transportasi • Kepemilikan dan nilai dari penggunaan peralatan listrik • Kepemilikan aset lainnya: kompor gas, uang tunai, dan emas

Sumber: Diadopsi dari model CGAP (2000).

frekuensi pembelian minyak sayur, frekuensi pembelian gula, stok makanan pokok, naiknya konsumsi karena peningkatan pendapatan, luas lahan yang dimiliki untuk usaha pertanian, harga lahan pertanian, dan harga kambing. Tahapan berikutnya adalah penggunaan analisis faktor dengan tes KMO dan Bartlett. Tes ini diperlukan untuk menguji baik tidaknya suatu model terkait beberapa komponen yang terpilih tersebut (Tabel 3).

Tabel 3 menunjukkan hasil tes KMO dan Bartlett dengan nilai 0,709 yang artinya komponen-komponen yang digunakan dalam model sudah baik karena nilainya sudah di atas 0,7. Selanjutnya dengan menggunakan matriks komponen, dikelompokkan masing-masing komponen terpilih yang mewakili variabel-variabel sumber daya manusia, perumahan, ketahanan dan kerawanan pangan, serta kepemilikan aset (Tabel 4).

Tabel 4 menunjukkan komponen-komponen yang merepresentasikan indeks kemiskinan relatif, yaitu terdiri dari tiga belas komponen yang mewakili variabel sumber daya manusia, ketahanan dan kerawanan pangan, perumahan, dan kepemilikan aset. Variabel ketahanan dan kerawanan pangan direpresentasikan oleh komponen persediaan makanan pokok, frekuensi pembelian beras, frekuensi pembelian minyak sayur, frekuensi pembelian gula, jumlah makanan yang tersaji dalam dua hari, konsumsi tambahan karena adanya peningkatan pendapatan, dan merasa kurang makan dalam sebulan. Variabel terkait sumber daya manusia ditunjukkan oleh komponen perbandingan antara yang bekerja dengan tidak bekerja dalam satu masyarakat. Variabel tempat tinggal ditunjukkan dengan komponen kualitas bahan atap. Variabel

kepemilikan aset ditunjukkan oleh komponen sebagai berikut: harga dan luas lahan yang pertanian yang dimiliki, juga harga kambing yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut tampak komponen yang terkait dengan variabel ketahanan dan kerawanan pangan merupakan komponen yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap indeks kemiskinan relatif. Dari ke 13 komponen yang terpilih penyusun indeks, terdapat enam komponen yang mewakili variabel ketahanan, dan kerawanan pangan, yaitu persediaan makanan pokok, frekuensi pembelian beras, frekuensi pembelian minyak sayur, frekuensi pembelian gula, jumlah makanan yang tersaji dalam dua hari, konsumsi tambahan karena adanya peningkatan pendapatan, dan merasa kurang makan dalam sebulan. Berdasarkan nilai keragaman masing-masing komponenpun menunjukkan bahwa komponen-komponen penyusun variable pangan memberikan keragaman yang paling tinggi dibandingkan komponen lainnya (Tabel 5).

Tabel 5 menunjukkan nilai *varians* yang dapat dijelaskan oleh setiap komponen. Komponen persediaan makanan pokok mampu memberikan keragaman paling besar dibandingkan komponen lainnya, yaitu sebesar 27,50%. Sementara itu, komponen luas lahan yang dimiliki hanya mampu memberikan keragaman yang paling rendah, yaitu 0,277%. Untuk menunjukkan baik tidaknya masing-masing komponen dalam menyusun indeks maka perlu dilihat komunalitis masing-masing komponen (Tabel 6).

Tabel 6 menunjukkan nilai komunalitis masing-masing komponen yang digunakan sudah mencapai angka 0,5. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga belas komponen yang masuk dalam indeks sudah baik. Setelah dilakukan tahapan dalam analisis komponen

Tabel 2 Nilai korelasi antara variabel-variabel yang mewakili indeks kemiskinan relatif

Indikator	Total pengeluaran pakaian	
	<i>r</i>	<i>p value</i>
Rata-rata umur dewasa	-.120	.171
Persentasi bisa menulis	.130	.139
Persentasi tingkat pendidikan	.021	.807
Persentasi orang dewasa yang bekerja	-.135	.123
Rasio bekerja dengan tidak bekerja	.355**	.000**
Persentasi anak di bawah 15 tahun	-.069	.431
Status kepemilikan tempat tinggal	-.193*	.027
Jumlah ruangan yang dimiliki	-.019	.830
Bahan atap yang digunakan	.186*	.033*
Jenis dinding	.016	.860
Jenis lantai	.102	.248
Kondisi rumah	.110	.211
Penerangan listrik	.135	.126
Jenis bahan bakar yang digunakan	.060	.496
Sumber air minum	.039	.659
Jumlah makanan tersaji dalam 2 hari	-.454**	.000**
Jumlah konsumsi daging sapi	.b	
Jumlah konsumsi daging ayam	.100	.256
Jumlah konsumsi ikan asin	-.046	.602
Kekurangan makanan dalam bulan ini	-.191*	.028
Kekurangan makanan dalam tahun ini	-.138	.115
Frekuensi beli beras	.488**	.000**
Frekuensi beli minyak sayur	.449**	.000**
Frekuensi beli gula pasir	.224*	.010*
Stok makanan pokok	.490**	.000**
Kenaikan konsumsi karena peningkatan pendapatan	-.325**	.003**
Luas lahan yang dimiliki untuk pertanian	.269**	.003**
Nilai lahan pertanian	.207*	.025*
Nilai kendaraan	-.026	.772
Nilai peralatan listrik	.108	.221
Kepemilikan aset lainnya	-.021	.810
Nilai sapi	.b	
Nilai kambing	.252*	.036*
Nilai ayam	.183	.073
Nilai bebek	.116	.414
Jumlah uang tabungan	.083	.347
Nilai perhiasan emas	.077	.538

Sumber: Data primer yang diolah (2015)

Keterangan

** = berbeda nyata dengan nol pada taraf $\alpha = 1\%$

* = berbeda nyata dengan nol pada taraf $\alpha = 5\%$.

Tabel 3 Hasil tes KMO dan Bartlett

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0,709
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	76.829
	Df	78
	Sig.	0,516

Sumber: Data primer yang diolah (2015).

utama, maka diperoleh nilai kemiskinan dengan sebaran nilai yang berada dari -0,910411–0,16785. Berdasarkan sebaran indeks tersebut dilakukan kategorisasi indeks kemiskinan relatif antara nasabah dan bukan nasabah, dengan kategori sebagai berikut:

- Jika nilai indeks kurang dari -0,91041 (nilai indeks rendah), artinya masyarakat yang berada pada kategori ini merupakan masyarakat yang miskin.
- Jika nilai indeks antara -0,91041–0,16785 (nilai indeks sedang), artinya masyarakat yang berada pada kategori ini merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sedang.

- Jika nilai indeks di atas 0,16785 (nilai indeks tinggi), artinya masyarakat yang berada pada kategori ini merupakan masyarakat sejahtera.

Tabel 7 menunjukkan mayoritas tingkat kesejahteraan nasabah LKMS lebih baik dibandingkan dengan bukan nasabah LKMS, karena berada pada kelompok indeks tertinggi, yaitu sebanyak 54,4%. Artinya, berdasarkan beberapa variabel yang membentuk indeks, yaitu variabel sumber daya manusia, perumahan, ketahanan, dan kerawanan pangan juga kepemilikan aset tampak bahwa nilai kesejahteraan nasabah LKMS lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan nasabah. Sementara masyarakat miskin yang menjadi jangkauan layanan LKMS hanya sebesar 17%. Hal ini menunjukkan bahwa LKMS di daerah penelitian memberikan layanan keuangan lebih banyak kepada masyarakat sektor pertanian yang lebih sejahtera, jika dibandingkan dengan yang bukan nasabah. Hal ini bisa dijelaskan dengan fenomena komersialisasi dari LKM. Ciri generasi

Tabel 4 Matrik komponen penyusun indeks kemiskinan relatif

	Komponen				
	1	2	3	4	5
Stok makanan pokok	0,915	-0,067	-0,004	0,209	0,122
Frekuensi pembelian beras	0,909	-0,069	-0,006	0,171	0,134
Frekuensi pembelian minyak sayur	0,750	-0,143	-0,090	0,263	0,178
Frekuensi pembelian gula pasir	0,694	-0,119	0,277	0,003	-0,127
Jumlah makanan tersaji dalam dua hari	-0,587	0,118	0,311	0,161	0,213
Peningkatan konsumsi akibat naiknya pedapatan	-0,484	0,038	-0,166	0,430	-0,079
Harga lahan pertanian	0,063	0,749	0,205	-0,113	0,284
Harga kambing	0,167	0,519	0,346	0,370	-0,082
Status kepemilikan tempat tinggal	-0,193	-0,464	0,435	0,084	0,462
Kekurangan makanan dalam bulan ini	0,030	-0,395	0,633	-0,453	-0,054
Rasio bekerja dengan tidak bekerja	0,387	0,108	-0,270	-0,568	-0,189
Bahan atap yang digunakan	0,202	0,345	0,456	0,049	-0,556
Luas lahan yang dimiliki untuk pertanian	0,162	0,486	-0,042	-0,357	0,493

Sumber: Data primer yang diolah (2015).

Tabel 5 Nilai *varians* setiap komponen

Komponen	Initial eigenvalues			Extraction sums of squared loadings		
	Total	% of Varians	Kumulatif %	Total	% of Varians	Kumulatif %
	Stok makanan pokok	3.575	27.499	27.499	3.575	27.499
Frekuensi pembelian beras	1.628	12.524	40.023	1.628	12.524	40.023
Frekuensi pembelian minyak sayur	1.244	9.570	49.593	1.244	9.570	49.593
Frekuensi pembelian gula pasir	1.168	8.985	58.578	1.168	8.985	58.578
Jumlah makanan tersaji dalam dua hari	1.023	7.869	66.446	1.023	7.869	66.446
Peningkatan konsumsi akibat naiknya pendapatan	0,925	7.117	73.563			
Harga lahan pertanian	0,758	5.829	79.392			
Harga kambing	0,700	5.384	84.776			
Status kepemilikan tempat tinggal	0,619	4.764	89.540			
Kekurangan makanan dalam bulan ini	0,503	3.872	93.412			
Rasio bekerja dengan tidak bekerja	0,476	3.664	97.076			
Bahan atap yang digunakan	0,344	2.647	99.723			
Luas lahan yang dimiliki untuk pertanian	0,036	0,277	100.000			

Sumber: Data primer yang diolah (2015).

Tabel 6 Nilai komunalitis masing-masing komponen

	Initial	Extraction
Rasio bekerja dengan tidak bekerja	1.000	0,593
Status kepemilikan tempat tinggal	1.000	0,662
Bahan atap	1.000	0,679
Kekurangan makanan dalam sebulan	1.000	0,765
Beli beras	1.000	0,879
Beli sayur	1.000	0,692
Beli gula	1.000	0,590
Stok pokok	1.000	0,900
Jika pendapatan naik	1.000	0,455
Luas lahan yang dimiliki untuk pertanian	1.000	0,635
Harga lahan pertanian	1.000	0,701
Harga kambing	1.000	0,560
Jumlah makan tersaji dalam 2 hari	1.000	0,527

Sumber: Data primer yang diolah (2015).

kedua dari LKM adalah bertujuan mencapai keberlanjutan usaha untuk menutup operasional usaha lembaga tanpa tergantung kepada lembaga donor dan pemerintah (Montgomery & Weiss 2011), dengan demikian operasionalisasi LKM lebih bersifat komersil yang berorientasi kepada keuntungan (Charitonenko *et al.* 2004). Adanya tuntutan keberlanjutan usaha tetapi dilain pihak LKM harus merealisasikan misi sosialnya yang terefleksikan pada jangkauan layanan-

nya (*service outreach*) terhadap masyarakat miskin akan menimbulkan terjadinya *trade off* (Acharya & Acharya 2006; Nugroho 2009; Hermes *et al.* 2011; Hermes & Lensink 2011; Montgomery & Weiss 2011; Hartarska *et al.* 2013). Perkembangan inilah yang menyebabkan LKM merubah perilakunya dalam memperluas layanan dan aktivitasnya, dengan meninggalkan nasabah miskin untuk dialihkan kepada nasabah berpendapatan tinggi dengan pinjaman yang besar

Tabel 7 Indeks kemiskinan relatif

Kelompok indeks kemiskinan relatif		Responden		
		Non nasabah	Nasabah	Total
Rendah		17	17	34
		32,7%	21,5%	26%
	Sedang	18	19	37
Tinggi		34,6%	24,1%	28,2%
		17	43	60
		32,7%	54,4%	45,8%
Total		52	79	131
		100%	100%	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2015).

pula. Kondisi inilah sering disebut dengan *Mission Drift* dari LKM (Ledgerwood & white 2006; Mersland & Strom 2010).

KESIMPULAN

Studi ini menganalisis jangkauan layanan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Seperti halnya dengan lembaga keuangan mikro pada umumnya, jangkauan layanan keuangannya difokuskan kepada masyarakat miskin produktif atau masyarakat berpendapatan rendah. Secara teoritis, masyarakat miskin terutama di wilayah perdesaan dengan mata pencaharian utama sektor pertanian merupakan salah satu kategori yang secara konsisten tidak dilayani oleh lembaga keuangan formal atau perbankan. Harapannya, dengan semakin banyaknya LKMS bisa lebih berperan dalam menjembatani masyarakat miskin untuk akses kepada layanan keuangan baik itu layanan pembiayaan dan tabungan. Dalam mengukur jangkauan layanan LKMS bagi masyarakat miskin menggunakan *principle component analysis* yang diadopsi dari model CGAP. Dengan model ini, beberapa komponen atau indikator yang mewakili variable sumber daya manusia, perumahan, ketahanan dan kerawanan pangan, juga variable kepemilikan aset diolah sehingga terbentuklah indeks kemiskinan relatif. Perhitungan indeks kemiskinan relatif yang didasarkan kepada variabel-variabel tersebut lebih berguna dalam menghitung indeks kemiskinan karena menggambarkan multidimensi dari kemiskinan yang bisa dibandingkan antara nasabah LKMS dengan non nasabah.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian model indeks kemiskinan relatif dengan menggunakan PCA diperoleh beberapa komponen yang menyusun indeks kemiskinan relatif. Komponen perbandingan antara yang bekerja dengan tidak bekerja dalam satu masyarakat mewakili variabel sumber daya manusia. Komponen kualitas material atap mewakili variabel perumahan. Variabel ketahanan dan kerawanan pangan ditunjukkan oleh komponen persediaan makanan pokok, frekuensi pembelian beras, frekuensi pembelian minyak sayur, frekuensi pembelian gula, jumlah makanan yang tersaji dalam dua hari, konsumsi tambahan karena adanya peningkatan pendapatan, dan merasa kurang makan dalam sebulan. Sementara variabel kepemilikan aset diwakili oleh

komponen harga dan luas lahan yang pertanian yang dimiliki, juga nilai kambing yang dimiliki. Nilai masing-masing indikator tersebut dalam menyusun indeks dikatakan baik karena nilai komunalitis mencapai 0,7. Selanjutnya dengan menggunakan skor komponen utama diperoleh skor kemiskinan dengan sebaran indeks dari -0,910411–0,16785. Berdasarkan sebaran selanjutnya dilakukan kategorisasi indeks kemiskinan relatif dari rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan kategorisasi tersebut nampak bahwa jangkauan LKMS di daerah penelitian lebih ditujukan kepada rumah tangga sektor pertanian yang relatif sejahtera. Kecenderungan ini terjadi sebagai akibat komersialisasi LKMS yang menuntut LKMS berkelanjutan tanpa tergantung pada donor atau pemerintah. Akibatnya, LKMS akan memilih lebih selektif nasabah yang relatif sejahtera dengan nilai pinjaman yang tinggi pula, supaya bisa menutup biaya operasional bahkan bisa menghasilkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya YP, Acharya U. 2006. Sustainability of Microfinance Institution from Small Farmer's Perspective: a. Case of Rural Nepal. *International Review of Business Research Papers*. 2(2): 117–126.
- Ahmed H. 2002. Financing Microenterprises: An Analytical Studi of Islamic Microfinance Institutions. *Islamic Economic Studies*. 9(2): 27–64.
- Ali AH, Abu-Hadi AO, Ali AYS. 2013. The Accessibility of Microfinance for Small Businesses in Mogadishu, Somalia. *International Journal of Humanities and Social Science*. 3(11): 172–180.
- Aubert C, De Janvry A, Sadoulet E. 2009. Designing Credit Agent Incentives to prevent Mission Drift in Pro-Poor Microfinance Institutions. *Journal of Development Economics*. 90(1): 153–162. <http://doi.org/df7x6f>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488>

- Buchori A. 2012. *Linkage Program Bank Syariah-BMT Solusi Financial Inclusion bagi UMK*. Makalah tidak dipublikasikan, Bank Indonesia.
- Copestake J, Dawson P, Fanning JP, McKay A, Revollo KW. 2005. Monitoring the Diversity of Poverty Outreach and impact of Microfinance: A Comparison of Methods Using Data from Peru. *Development Policy Review*. 23(6): 703–723. <http://doi.org/cnd9hp>
- Charitonenko S, Campion A, Fernando NA. 2004. *Commercialization of Microfinance: Perspectives from South and Southeast Asia*. Asian Development Bank.
- Cull R, Demirguc-Kunt A, Morduch J. 2009. *Microfinance Trade offs Regulation, Competition, and Financing. Policy Research Working Paper*. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Team.
- Diagne A, Zeller M. 2001. *Access to Credit and its impact on Welfare in Malawi. Research Report 116*. Washington DC (US): International Food Policy Research Institute.
- El-Komi M, Croson R. 2012. Experiments in Islamic Microfinance. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 95: 252–269. <http://doi.org/7fr>
- Godquin M. 2004. Microfinance Repayment Performance in Bangladesh: How to Improve the Allocation of Loans by MFIs. *World Development*. 32(11): 1909–1926. <http://doi.org/dgp2dr>
- Gonzales-Vega C, Schreiner M, Meyer RL, Rodriguez J, Navajas S. 1997. BancoSol: The Challenge of Growth for Microfinance Organizations. In: *Microfinance for The Poor?* Schneider H (ed). IFAD/OECD.
- Hartarska V, Shen X, Mersland R. 2013. Scale Economies and Input Price Elasticities in Microfinance Institutions. *Journal of Banking & Finance*. 37(1): 118–131. <http://doi.org/7fs>
- Henry C, Sharma M, Lapenu C, Zeller M. 2000. *Assessing the Relative Poverty of Microfinance Clients. A CGAP Operational Tool*. Washington DC (US): IFRI.
- Hermes N, Lensink R. 2011. Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability. *World Development*. 39(6): 875–881. <http://doi.org/dx8br7>
- Hermes N, Lensink R, Meesters A. 2011. Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions. *World Development*. 39(6): 938–948. <http://doi.org/fsvdbb>
- Hulme D, Montgomery R, Bhattacharya D. 1996. *Mutual Finance and The Poor*. In: Hulme D, Mosley P (ed). *Finance Against Poverty*. Vol.2. London & New York (US): Routledge.
- Hundak K. 2012. What Next for Microfinance? How The Broader Financial Context Matters for Effective Microfinance Outreach. *Journal of Developmental Entrepreneurship*. 17(4): 1–18. <http://doi.org/7ft>
- Islam A, Maitra P. 2011. Health Shocks and Consumption Smoothing in Rural Households: Does Microcredit Have a Role to Play?. *Journal of Development Economics*. 97(2): 232–242. <http://doi.org/b9vz6m>
- Ledgerwood J, White V. 2006. *Transforming Microfinance Institutions: Providing Full Financial Services to the Poor*. The World Bank. <http://doi.org/c748fr>
- Li X, Gan C, Hu, B. 2011. Accessibility to Microcredit by Chinese Rural Households. *Journal of Asian Economics*. 22(3): 235–246. <http://doi.org/dd8msn>
- Menkhoff L, Rungruxsivorn O. 2011. Do Village Funds Improve Access to Finance? Evidence from Thailand. *World Development*. 39(1): 110–122. <http://doi.org/cbb8nx>
- Mersland R, Strom RO. 2010. Microfinance Mission Drift?. *World Development*. 38(1): 28–36. <http://doi.org/czntt8>
- Miyashita Y. 2000. Microfinance and Poverty Alleviation: Lesson from Indonesia's Village Banking System. *Pacific Rim Law & Policy Journal*. 10(1): 147–189.
- Montgomery H, Weiss J. 2011. Can Commercially-oriented Microfinance Help Meet the Millennium Development Goals? Evidence from Pakistan. *World Development*. 39(1): 87–109. <http://doi.org/c7zhn5>
- Morduch J. 1998. *Does Microfinance Really Help the poor? New evidence from Flagship Programs in Bangladesh*. Makalah ketika National Fellow di the Hoover Institutions, Stanford University (US).
- Mpuga P. 2010. Constraints in Access to Demand for Rural Credit: Evidence from Uganda. *African Development Review*. 22(1): 115–148. <http://doi.org/dv9dwq>
- Munawar A. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan BPR serta Interaksi Hubungan Kinerja dan Jangkauannya (Studi terhadap Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten). [Tesis]. Depok (ID): Universitas Indonesia.
- Nader YF. 2008. Microcredit and Socio-Economic Wellbeing of Women and Their Families in Cairo. *The Journal of Socio-Economics*. 37(2): 644–656. <http://doi.org/fmxpvf>
- Navajas S, Schreiner M, Meyer SL, Gonzalez-Vega C, Rodriguez-Meza J. 2000. Microcredit and the Poorest of the Poor: Theory and Evidence from Bolivia. *World Development*. 28(2): 333–346. <http://doi.org/dkfr86>

- Nugroho AE. 2009. The Commercialization-Outreach Nexus of Microfinance in Indonesia: The Case Study of Microfinance Industry in Boyolali, Central Java. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 17(2): 55–64.
- Nuryartono N. 2007. Credit Rationing of Farm Households and Agricultural Production; Empirical Evidence in The Rural Areas of Central Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*. 4(1): 15–21.
- Paxton J, Cuevas CE. 2002. *Outreach and Sustainability of Member-Based Rural Financial Intermediaries at The Triangle of Microfinance*, 2002. In: Zeller M, Meyer RL (ed). Washington (US): The international Food Policy Research Institute.
- Perhimpunan BMT Indonesia. 2012. Haluan BMT 2020.
- Rahman ARA. 2007. Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*. 1(2): 38–53.
- Saptono IT, Marimin, Tambunan M, Oktaviani R. 2010. Desain Lembaga Pembiayaan Pertanian Nasional Subsektor Tanaman Pangan Menggunakan Pendekatan Interpretative Structural Modeling (ISM). *Jurnal Manajemen & Agribisnis*. 7(2): 84–96.
- Toha M, Firmansyah, Nadjib M, Septia Y, Mulyaningsih Y, Masyhuri. 2010. *Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan Agribisnis*. Jakarta (ID): Laporan Penelitian P2E-LIPI.
- Todaro MP, Smith SC. 2009. *Economic Development*. 10th Edition. Harlow (GB): Pearson Education Ltd.
- World Bank. 2011. Global Financial Inclusion Database. <http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx>
- Zeller M, Sharma M. 2000. Many borrow, more save, and all insure: implications for food and micro-finance. *Food Policy*. 25(2): 143–167. <http://doi.org/cmfdvc>
- Zeller M, Sharma M, Henry C, Lapenu C. 2006. An Operational Method for Assessing the Poverty Outreach Performance of Development Policies and Project: Result of Case Studies in Africa, Asia and Latin America. *World Development*. 34(3): 446–464. <http://doi.org/bgdp2h>